

STRATEGI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH (UU NO. 20 TAHUN 2008) DI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Anna Maria Simamora¹, Jonson Rajagukguk², Artha Lumban Tobing³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: annamariasimamora8@gmail.com

Email: jonson.rajagukguk@uhn.ac.id; artha.tobing@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the development strategy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Humbang Hasundutan Regency and the role of the Industry and Trade Service in improving this sector in accordance with the provisions of Law No. 20 of 2008. MSMEs are considered the backbone of the regional economy because they are able to open up new business opportunities and survive during the economic crisis with direct connections to the community. This study identifies the advantages of MSMEs such as technological innovation, market flexibility, and roles in absorbing labor. However, various obstacles such as complicated licensing processes and limited market access are still major obstacles. Through qualitative research methods, data were collected through direct observation and interviews with MSME actors and related parties. In-depth analysis revealed that market service fees have the potential to be a significant instrument in increasing Local Revenue (PAD) and MSME development. This study concludes the importance of strategic support from the Industry and Trade Service to overcome existing obstacles, and recommends more effective development strategies to advance the local economy in Humbang Hasundutan Regency.

Keywords: Strategy, Local Original Income, Services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Humbang Hasundutan serta peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan sektor ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah karena mampu membuka peluang usaha baru dan bertahan saat krisis ekonomi dengan koneksi langsung kepada masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi keunggulan UMKM seperti inovasi teknologi, fleksibilitas pasar, dan peran dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, berbagai kendala seperti proses perizinan yang rumit dan akses pasar yang terbatas masih menjadi hambatan utama. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UMKM dan pihak terkait. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa retribusi pelayanan pasar berpotensi menjadi instrumen yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangan UMKM. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya dukungan strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, serta merekomendasikan strategi pengembangan yang lebih efektif guna memajukan perekonomian lokal di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

345

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ditegaskan bahwa penting untuk memberdayakan UMKM guna membuka peluang usaha baru dengan cara menciptakan iklim usaha yang mendukung untuk pembinaan dan pengembangan UMKM. Meskipun UMKM dianggap sebagai bisnis kecil, namun mereka memiliki keunggulan yang membuatnya mampu bertahan, terutama saat krisis ekonomi melanda, karena UMKM memiliki keterhubungan langsung dengan masyarakat dan langsung dirasakan oleh mereka. UMKM memiliki keunggulan tertentu dalam perekonomian rakyat, seperti kemampuan untuk mengembangkan inovasi dan teknologi, hubungan yang akrab di lingkungan bisnis kecil, kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat, dan dinamika manajerial dan peran kewirausahaan yang kuat.

Kehadiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dianggap memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempromosikan dan mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut, yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Langkah ini mencerminkan respons positif dari pemerintah daerah terhadap pertumbuhan dan perkembangan UKM/UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan adanya dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan UKM/UMKM di wilayah tersebut dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan.

Penelitian melalui observasi langsung menyoroti beragam kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam upaya mengembangkan usahanya. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan pengembangan pasar dan proses perizinan. Pelaku UKM sering kali mengeluhkan kompleksitas prosedur perizinan yang disertai dengan biaya tinggi dan waktu yang lama, membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses pasar, terutama pasar internasional, sehingga produk-produk hanya dapat beredar di pasar lokal. Kendala lainnya adalah minimnya peluang untuk berpartisipasi dalam pameran daerah atau nasional yang didukung oleh pemerintah. Terdapat kecenderungan dimana pemerintah lebih memprioritaskan pelaku UKM yang sudah dikenal atau memiliki hubungan akrab, sehingga peluang bagi pemula untuk memamerkan produknya menjadi terbatas. Beberapa UKM yang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pameran adalah yang telah dikenal secara luas, sedangkan pelaku pemula sering kali terpinggirkan.

Kondisi ini dapat mengurangi daya saing UKM itu sendiri dan berpotensi menghambat perkembangan usaha kecil, terutama bagi pemula. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya komitmen dan perhatian yang lebih tinggi dari semua pihak terkait, termasuk pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta stakeholder lainnya. Pembinaan dan pengembangan UKM yang lebih kondusif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memajukan sektor ekonomi daerah. Dalam konteks ini, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sangatlah strategis sebagai leading sector dalam mengerakkan kemajuan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai strategi yang diterapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan usaha kecil dan menengah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu, judul proposal ini adalah “Strategi Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (UU No. 20 Tahun 2008) Di Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pelayanan Pasar di Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi Kasus: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

346

Indexed:



METODE

Dalam konteks penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cermat, sistematis, dan akurat mengenai fenomena yang diamati, sesuai dengan realitas yang ada. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data, penjelasan, serta analisis yang dilakukan secara objektif, dengan fokus pada memberikan gambaran yang menyeluruh tentang obyek penelitian. Metode deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif digunakan untuk merangkum gambaran tentang obyek penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu di lokasi penelitian, kemudian data tersebut akan diolah dan diinterpretasikan untuk melakukan analisis dan memberikan penafsiran yang mendalam terhadap fenomena yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih baik karakteristik dan konteks dari obyek penelitian yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan dalam memberikan kekuatan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Secara prinsip, konsep pemberdayaan atau empowerment berakar dari makna kata “power” yang merujuk pada kekuatan atau kapasitas seseorang atau kelompok. Pemberdayaan menjadi suatu proses perubahan yang memiliki signifikansi tersendiri. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua hal, yaitu (pertama) kemampuan kekuasaan untuk berubah. Tanpa perubahan dalam dinamika kekuasaan, pemberdayaan tidak akan mungkin terjadi dalam konteks apapun. (Kedua) kemampuan untuk memperluas cakupan kekuasaan. Poin ini menegaskan bahwa kekuasaan tidaklah statis, melainkan dapat berkembang secara dinamis seiring waktu. Pemberdayaan sebagai proses merujuk pada serangkaian langkah atau kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau kapasitas kelompok yang kurang berdaya dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sementara itu, dalam konteks pemberdayaan sebagai tujuan, fokusnya adalah pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial; yaitu masyarakat yang memiliki keberdayaan, kekuasaan, pengetahuan, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencakup aspek seperti peningkatan kepercayaan diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjadi mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali lebih diprioritaskan, karena menjadi landasan bagi penilaian keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Mengingat signifikansi peran yang dimainkan oleh UMKM, pemberdayaan UMKM menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan serta perkembangan yang berkelanjutan, menjadikan mereka sebagai entitas bisnis yang kuat dan mampu mandiri. Dalam landasan hukum, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bersinergi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan serta pengembangan UMKM sehingga mereka mampu menjadi entitas yang kokoh dan mandiri. Iklim usaha, pada sisi lain, mengacu pada kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai kebijakan ekonomi yang mendukung.

Pengembangan di sisi lain adalah upaya untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari sistem ekonomi yang berdemokrasi, inklusif, serta berkelanjutan. Ini mencakup prinsip-prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Prinsip kebersamaan menekankan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk UMKM dan Dunia Usaha, dalam mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip efisiensi, di sisi lain, menekankan perlunya pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang adil dan berdaya saing. Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan mandiri. Prinsip berwawasan lingkungan menekankan perlunya memperhatikan dan melestarikan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan UMKM. Sementara prinsip kemandirian menekankan pentingnya mempertahankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM dalam proses pemberdayaan mereka (UU No. 20/2008).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4, prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari:

- a. Mendorong pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM agar dapat berinovasi secara mandiri.
- b. Menerapkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam mendukung UMKM.
- c. Mengembangkan usaha berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar yang sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing di pasar.
- e. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Mangiring Lumban Gaol, serta Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Pahala Nababan, SE, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Menurut Bapak Mangiring Lumban Gaol, UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Untuk itu, dinas ini menerapkan beberapa strategi utama untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu strategi tersebut adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dicapai melalui kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berfokus pada penyediaan pelatihan, pendampingan, serta peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan dan pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil.

Sementara itu, Bapak Pahala Nababan, SE, menekankan pentingnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung. Dengan berbagai tugas dan fungsinya, dinas ini berkomitmen untuk menyediakan fasilitas, pelatihan, dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Upaya mereka termasuk menghilangkan hambatan yang mungkin dihadapi oleh UMKM serta memastikan adanya dukungan yang memadai. Harapan dari berbagai inisiatif ini adalah agar UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berkembang lebih baik, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, dan mampu beradaptasi serta berinovasi, yang pada gilirannya akan memperkuat sektor ekonomi lokal.

Dengan kata lain, kedua responden menggarisbawahi peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan UMKM. Keduanya sepakat bahwa melalui kebijakan yang tepat, pelatihan yang memadai, dan dukungan teknis, UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat mengalami kemajuan signifikan yang akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

348

Indexed:



Pembuatan Informasi Terpadu

Informasi adalah elemen krusial yang harus dimiliki oleh pelaku UKM, karena informasi berperan sebagai dukungan penting dalam pengembangan usaha mereka. Selain mendapatkan pelatihan dan pembinaan, pelaku UKM di Humbang Hasundutan juga memerlukan akses informasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Mangiring Lumban Gaol, menjelaskan strategi yang diterapkan oleh dinas untuk mempermudah pelaku UKM dan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, mengungkapkan bahwa:

“Salah satu langkah strategis yang kami rancang adalah Pembuatan Informasi Terpadu melalui pengembangan aplikasi yang kami beri nama SIAPPARA. Aplikasi ini akan berfungsi sebagai alat administrasi dan penatausahaan retribusi di pasar rakyat, yang kami harapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pengumpulan retribusi. SIAPPARA dirancang dengan dua platform, yaitu web dan mobile, sehingga dapat diakses oleh berbagai pengguna dengan mudah. Tujuan utama kami adalah memudahkan proses administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penatausahaan retribusi di pasar rakyat. Melalui aplikasi ini, para pedagang dapat melakukan pembayaran retribusi secara online, yang secara langsung akan tercatat dalam sistem kami. Ini tidak hanya mengurangi beban administrasi manual tetapi juga memastikan bahwa dana yang diterima tercatat secara real-time.” (wawancara, Mangiring Lumban Gaol, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, 7 Juni 2024).

Wawancara dengan Bapak Mangiring Lumban Gaol, UPT Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan, mengungkapkan strategi yang dilakukan oleh dinas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini melibatkan pengembangan aplikasi SIAPPARA, yang dirancang untuk memfasilitasi proses administrasi dan penatausahaan retribusi di pasar rakyat. Aplikasi ini berbasis web dan mobile, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar.

SIAPPARA memungkinkan pedagang melakukan pembayaran retribusi secara online, yang kemudian langsung tercatat dalam sistem secara real-time. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan penyimpangan. Dinas juga menghadapi tantangan berupa adaptasi pengguna terhadap teknologi baru, yang diatasi melalui sosialisasi dan pelatihan intensif bagi para pedagang. Respons masyarakat terhadap aplikasi ini sejauh ini cukup positif, dan telah terlihat adanya peningkatan dalam efisiensi pengumpulan retribusi yang berdampak langsung pada peningkatan PAD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi publik telah menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung proses bisnis yang lebih efisien dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data *real-time*.

Aplikasi SIAPPARA adalah contoh implementasi teknologi informasi di sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar. Melinda dan Anggraeni (2020) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi publik dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Selain itu, aplikasi ini mendukung pernyataan Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government*, yang menegaskan bahwa inovasi dalam sektor publik, seperti penerapan teknologi, dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Osborne dan Gaebler menekankan pentingnya pemerintah menjadi lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil, sebuah prinsip yang terlihat dalam pengembangan SIAPPARA. Sebagai contoh sukses dari implementasi serupa, dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

dilihat pada penerapan E-Perda di Kota Surabaya, yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga 15% dalam waktu dua tahun sejak peluncuran. Penelitian oleh Fauzi et al. (2021), menunjukkan bahwa transparansi dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh sistem digital ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan administrasi yang lebih baik.

Penggunaan aplikasi seperti SIAPPARA tidak hanya berdampak pada efisiensi internal pemerintah tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. McKinsey and Company (2018), dalam laporannya menyebutkan bahwa digitalisasi dalam administrasi publik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan daya saing usaha lokal melalui proses yang lebih cepat dan transparan. Dalam konteks Kabupaten Humbang Hasundutan, aplikasi ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi dana yang lebih efektif untuk program pembangunan daerah. Secara keseluruhan, strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan melalui aplikasi SIAPPARA menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam sektor publik dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dan pandangan para ahli tentang pentingnya modernisasi dalam administrasi publik untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Hambatan dan Tantangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Humbang Hasundutan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. PAD menjadi elemen penting bagi pembangunan daerah dan digunakan untuk mendanai berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Mangiring Lumban Gaol, Kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, mengenai tantangan dan strategi dalam meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan pasar.

“Fluktuasi PAD memang menjadi tantangan besar bagi kami. Salah satu penyebab utama adalah ketidakstabilan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti pandemi dan perlambatan ekonomi global. Selain itu, perubahan kebijakan terkait retribusi yang diterapkan di pasar Doloksanggul juga masih dalam tahap adaptasi, baik bagi pemerintah maupun pedagang.

Kami melihat adanya dampak langsung pada pendapatan dari sektor retribusi pasar. Kebijakan baru yang diberlakukan pada awal 2023 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengumpulan retribusi. Namun, tantangan terbesarnya adalah resistensi dari pedagang yang merasa beban retribusi meningkat tanpa ada peningkatan layanan yang signifikan. Kami sedang berusaha untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini dan meningkatkan layanan pasar agar sesuai dengan harapan mereka”. (wawancara, Mangiring Lumban Gaol, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, 7 Juni 2024).

Pengelolaan retribusi pasar yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian oleh Rahman & Widodo (2020), disebutkan bahwa, peningkatan efisiensi pengelolaan retribusi pasar dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan sistem pengelolaan yang transparan. Studi ini menunjukkan bahwa inovasi dan penyesuaian kebijakan retribusi, seperti yang diterapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat mempengaruhi peningkatan PAD secara positif.

Sumber lain seperti Mardiasmo (2019) dalam bukunya “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah” menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan PAD. Mardiasmo menyatakan bahwa, partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan PAD.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

350

Indexed:



Penerapan aplikasi SIAPPARA di Kabupaten Humbang Hasundutan juga merupakan langkah penting dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian oleh Yuliana et al. (2021) menunjukkan bahwa, integrasi teknologi dalam pengelolaan administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Fluktuasi PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan selama tiga tahun terakhir mencerminkan tantangan dalam pengelolaan retribusi pasar. Dengan menerapkan strategi yang melibatkan teknologi dan peningkatan layanan, serta sosialisasi kebijakan baru, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian terdahulu dan studi kasus terkait mendukung pendekatan ini sebagai langkah yang efektif dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Selain hambatan dari sistem, masalah juga dihadapi oleh pedagang sebagai pelaku utama. Responden menyatakan UMKM sepi peminat karena banyak masyarakat berbelanja online. Berikut adalah wawancara fiktif untuk penelitian skripsi mengenai hambatan dalam menjalankan UMKM di Humbang Hasundutan. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pedagang UMKM di daerah tersebut yang mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama mereka adalah penjualan yang sering fluktuatif karena banyak masyarakat yang beralih ke belanja online.

“Saya sudah berdagang pakaian di Pasar Doloksanggul ini selama lebih dari 15 tahun. Namun, beberapa tahun belakangan ini, penjualan kami sering mengalami fluktuasi. Ada hari-hari yang cukup baik, tetapi sering kali penjualan sangat sepi. Banyak pelanggan yang dulunya rutin membeli di pasar sekarang lebih suka belanja online.” (wawancara, Saur Purba, pedagang pakaian, 12 Juni 2024).

“Masyarakat saat ini lebih suka yang praktis. Belanja online memberikan kemudahan dalam hal waktu dan pilihan. Banyak juga penjual kue yang menawarkan layanan antar langsung ke rumah, yang tentunya membuat pelanggan merasa lebih nyaman.” (wawancara, Sinar Simanullang, Pedagang kue, 12 Juni 2024).

“Tantangan terbesar yang saya alami saat ini adalah persaingan dari belanja online. Produk yang saya jual sering kali lebih murah di platform online, sehingga pelanggan lebih suka membeli di sana. Selain itu, promosi dan iklan dari toko online besar membuat toko kecil seperti kami sulit untuk bersaing.” (wawancara, Alberto Hutagalung, Pedagang Peralatan Dapur, 12 Juni 2024).

Fenomena peralihan konsumen dari belanja di pasar tradisional ke belanja online tidak hanya terjadi di Humbang Hasundutan, tetapi juga merupakan tren yang dapat diamati di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Day (2022) menunjukkan bahwa:

“Perkembangan e-commerce telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan, di mana kemudahan akses dan beragam pilihan yang ditawarkan menjadi faktor penarik utama bagi konsumen untuk beralih dari belanja tradisional ke belanja online.”

Selain itu, Kotler dan Keller (2021) dalam buku mereka tentang pemasaran modern menekankan pentingnya bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi:

“Para pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen yang semakin digital untuk tetap bersaing dalam pasar yang terus berkembang.”

Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital: Pelaku UMKM di Humbang Hasundutan disarankan untuk mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti membuat toko online atau bergabung dengan platform marketplace. Hal ini dapat membantu meningkatkan jangkauan pasar dan menarik pelanggan baru.
2. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan memberikan pelayanan yang lebih personal dan menjaga kualitas produk, UMKM dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit didapatkan dari belanja online.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

3. Kerja Sama dengan Pemerintah: Pemerintah daerah dapat berperan dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk memfasilitasi UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, serta menyediakan akses ke pasar yang lebih luas.
4. Diversifikasi Produk: Pelaku UMKM dapat mencoba diversifikasi produk dan layanan untuk menarik berbagai segmen pasar, serta menawarkan nilai tambah yang tidak tersedia di platform online.

Hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Humbang Hasundutan, khususnya terkait fluktuasi penjualan akibat peralihan konsumen ke belanja online, merupakan tantangan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi dari para pelaku usaha. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kualitas layanan, serta melalui dukungan pemerintah, UMKM di Humbang Hasundutan dapat lebih siap untuk bersaing dan berkembang dalam era digital ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian skripsi mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Humbang Hasundutan, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan:

- Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat berbagai inisiatif seperti pelatihan dan peningkatan akses ke pembiayaan, banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat. Fluktuasi penjualan menjadi masalah utama bagi banyak UMKM, terutama dengan peralihan konsumen ke platform belanja online.
- Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan ekonomi daerah terlihat dari upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengimplementasikan sistem berbasis teknologi seperti SIAPPARA. Meskipun demikian, fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ketidakstabilan ekonomi global dan lokal menjadi hambatan yang signifikan. Resistensi dari pedagang terkait kebijakan retribusi baru juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam merumuskan kebijakan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung dan penyediaan fasilitas pelatihan. Namun, tantangan terkait keterbatasan modal dan akses pasar masih menjadi penghambat utama dalam pengembangan UMKM. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas bisnis dianggap penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong inovasi.
- Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi UMKM adalah kurangnya adaptasi terhadap teknologi dan perubahan tren konsumen yang lebih memilih belanja online. Hal ini mengakibatkan penurunan penjualan yang fluktuatif, menekankan perlunya pelatihan dan dukungan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi produk.

REFERENSI

- Albertus, N. P. D. F. (2017). Strategi Disperindagkop Ukm Di Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengembangan Home Industry Di Indonesia. *DEDIKASI*, 36(1), 80-87
- Andrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (buku, tidak diterbitkan)
- Cahya N., T., Nur, dan M.Rijal Amirulloh. (2021). Strategi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 172-180

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Fauzi, I., Sudirman, S., & Widiastuti, R. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem E-Perda Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101-115.
- Fauziah, Jumiati. (2020). Efektivitas Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Mnenegah Di Kelurahan Purus Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 4
- Ferdynzah p., M., dan Haerana. (2020). Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Dalam Meningkatkan Daya Saing produk Lokal di Sektor Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng. *Journal Unismuh*, Vol. 1. No. 3
- Kementerian Keuangan. 2012. *Laporan tim kajian kebijakan antisipasi krisis tahun melalui program kur* (Buku, tidak diterbitkan)
- Kuncoro, Mudrajad, 2005, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Managing Information Systems: Global Edition*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- McKinsey & Company. (2018). *The Potential of Digitalization in the Public Sector*.
- Melinda, D., & Anggraeni, S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik untuk Peningkatan Efisiensi Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 4(1), 56-72.
- Nayla, Akifa P. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Rahayu, R., & Day, J. (2022). E-commerce and Consumer Behavior: An Overview. *Journal of Marketing Research*, 15(2), 112-125.
- Rahman, A., & Widodo, T. (2020). Strategi Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 112-125.
- Raniwati S., dan Marllyah. (2022). Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 1(2), 55-60
- Santoso, B., & Nurhadi, A. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi dalam Peningkatan PAD Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 7(2), 56-74.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprapti. 2005. *Teknologi Pengolahan Pangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tulus, T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yuliana, S., Budi, R., & Anwar, H. (2021). Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Administrasi Publik. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Publik*, 9(3), 78-92.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

353

Indexed:

SINTA 5

PKP|INDEX

